

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : Kabupaten Purbalingga

Halaman 15

## Pencairan Dana Desa Molor

PURBALINGGA- Sejumlah Desa belum diperbolehkan mencairkan Pencairan Dana Desa (DD) tahun 2017. Pasalnya Kepala Desa (Kades) yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan DD tahun sebelumnya. "Padahal LPJ tersebut merupakan syarat untuk pencairan DD tahap berikutnya," kata Kasi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) Purbalingga, Sapta Wasono, Kamis (6/7).

Pihaknya mengimbau agar ka-

des segera segera menyelesaikan laporan penggunaan DD sebagai syarat proses pencairan. Anggaran untuk DD sudah masuk pada rekening kas daerah. Jika pencairan terus molor, maka bisa menghambat proses tahap berikutnya.

Berdasarkan data di Dinpermasdes baru ada tujuh desa yang sudah melakukan pencairan. Sedangkan lima desa baru mengajukan, dan dua desa masih proses verifikasi di Bapermades. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dari total

desa yang ada di kabupaten Purbalingga yakni 224 desa.

Menurutnya, lambatnya proses pengajuan proposal DD juga dimungkinkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, dalam pengajuan selain melampirkan rincian anggaran, juga harus disertakan desain proyek pembangunan fisik. Hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh orang yang kompeten.

"Ya tidak bisa dipungkiri, keterbatasan SDM juga pengaruh, karena

untuk yang pembangunan fisik harus ada desain dan rincian anggaran. Selain itu juga butuh waktu saat verifikasi, karena satu per satu," tuturnya.

Sementara itu, untuk Anggaran Dana Desa (ADD) termin II, sebanyak 143 desa yang sudah cair. Sedangkan 155 desa sudah masuk proses verifikasi, delapan desa sudah masuk Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan empat desa proses verifikasi di Dinpermasdes. ■

ST-ad